BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pesatnya pertumbuhan dan pembangunan yang terjadi di Kota Bandung ini berdampak pada semakin menurunnya kualitas udara dan tingginya ancaman terhadap kesehatan udara yang ada di Kota Bandung ini. Untuk mengimbangi tingkat kenaikan ancaman kesehatan di masa yang akan datang maka harus dilakukan penghijauan untuk mengimbangi pesatnya laju perkembangan dan pembangunan agar dapat meminimalkan angka ancaman pencemaran udara salah satunya yaitu dengan menanam pohon di setiap sudut dan sepanjang jalan kota yang memungkinkan untuk ditanami.

Pohon merupakan bagian dari kehidupan yang mempunyai peran penting dalam sebuah ekosistem. Sedangkan di daerah perkotaan, selain berperan sebagai sumber oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga dapat menyerap air untuk mengurangi resiko terjadinya banjir. Hal ini lah yang menjadi salah satu tujuan Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penanaman pohon sebagai bentuk penghijauan dengan menanam pepohonan di berbagai wilayah termasuk di sebelah jalan raya dan terus mengembangkan ruang terbuka hijau salah satu tujuan Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan

penanaman pohon sebagai bentuk penghijauan dengan menanam pepohonan di berbagai wilayah termasuk di sebelah jalan raya dan terus mengembangkan ruang terbuka hijau.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sebagaimana dikatakan di awal, ruang terbuka hijau ini dibedakan menjadi dua, yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, bahwa yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, tujuan, fungsi dan manfaat penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yaitu :

Tujuan RTHKP adalah :

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.

- b. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Fungsi RTHKP adalah :

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lingkungan perkotaan.
- b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara,
- c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati.
- d. Pengendalian tata air, dan
- e. Sarana estetika kota.

Pemerintah kota mempunyai kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam penanaman pohon di jalur hijau jalan, mulai dari pemilihan, penanaman hingga pemeliharaan pohon. Di mana selain untuk menambah estetika, pengaturan tentang penanaman pohon di jalur hijau jalan tersebut juga bertujuan untuk keamanan pengguna jalan. Dalam setiap tindakan yang dilakukan tentu mempunyai konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi. Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan RTH. Hal itu tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah

wajib melakukan pengelolaan RTH. Pemerintah Kota Bandung harus aktif melakukan pengawasan, perawatan, dan evaluasi terhadap pepohonan yang ditanam dan dikelola sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan itu dijelaskan mengenai kriteria tanaman atau tumbuhan apa yang ditanam pada jalur hijau jalan, dan hal-hal yang mesti diperhatikan dalam penanaman pohon. Mulai dari penyiapan tanah untuk media tanam hingga pengendalian hama dan penyakit tanaman. Salah satu yang diatur dalam penanaman adalah aktifitas pemeliharaan dari tanaman atau pohon tersebut. Bentuk pemeliharaan itu contohnya adalah pemangkasan. Eksplisit disebutkan bahwa untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan dilakukan:

1. Pemangkasan dilakukan pada cabang, dahan dan ranting yang dapat menghalangi pandangan pengguna jalan.
2. Untuk jalan yang dilalui kendaraan pada daerah permukiman diperlukan ruang terbebas dari juntaian ranting dan dahan pohon sekitar minimal 3,5 m dari permukaan tanah.
3. Untuk jalan umum yang dilalui kendaraan diperlukan ruang terbebas dari juntaian ranting dan dahan pohon sekitar 4,5-5 m dari permukaan tanah.

Apabila hal-hal yang sebagaimana yang telah disebutkan diatas tidak diperhatikan maka akan timbul berbagai permasalahan, salah satunya yaitu tumbang nya pohon. Jika tumbangnya pohon tersebut menimbulkan kerugian terhadap seseorang, kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immateriil, Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang diharapkan.¹ maka hal tersebut tentu perlu ditinjau dari aspek hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Tumbangnya pohon dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor bencana alam maupun cuaca seperti angin kencang, badai, gempa bumi dan lain-lain, dan juga dapat disebabkan oleh faktor dari pohon itu sendiri seperti pohon sudah tua, dan sudah tidak dapat tumbuh lagi, keropos di bagian tengahnya, dimakan rayap, dan batang-cabangnya mulai mengering Penanaman awal bukan bibit namun stek, sehingga akar berkembang ke samping, pohon sudah miring dan mulai ada retakan di sekeliling pohon, dan lain-lain. Pohon tumbang yang disebabkan bukan dari faktor bencana alam maupun cuaca dapat dicegah dengan melakukan pemeliharaan, pengawasan hingga pemangkasan dengan benar karena jika tidak diperiksa dengan benar, kita tidak akan tahu

¹ H. Riduan Syahrani, S.H., Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, P.T. Alumni, Bandung, 2006 hlm 266

apakah satu pohon mengalami pelapukan di bagian dalam dan sebagainya yang dapat mengakibatkan pohon tersebut tumbang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung sebagai pengelola menyelenggarakan tugas nya sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 21384 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan Kota Bandung untuk menyelenggarakan pemangkasan, perapihan ringan, sedang dan berat pada pohon/tanaman keras/tanaman hias sesuai kebutuhan yang berada pada wilayah taman sesuai dengan tugas nya pada pemeliharaan pertamanan, jika sekiranya kondisi pohon sudah rawan roboh dan membahayakan masyarakat di sekitarnya maka segera ditebang dan diganti yang baru sehingga dapat dilakukan pencegahan tumbangnya pohon yang dapat membahayakan orang atau properti yang ada di bawahnya. Tindakan ini adalah bagian dari mitigasi bencana untuk pengurangan risiko bencana akibat angin kencang dan sebagainya yang dapat mengakibatkan tumbangnya pohon.

Dalam hal ini pejabat yang berwenang mempunyai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk melakukan pengawasan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik agar tidak merugikan orang lain, seperti yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB dengan kondisi cuaca yang

cerah berawan pada saat itu, dimana telah terjadi suatu peristiwa tumbangnya pohon jenis mahoni yang menimpa seorang pengguna jalan bernama Dadang Sunarya yang sedang mengendarai sepeda motor yang melintasi Jalan Cibaduyut dari arah Terusan Cibaduyut, korban tertimpa pohon yang tumbang di tepat di Jl. Cibaduyut Raya No.42, Kel. Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dari arah kiri trotar jalan sehingga mengakibatkan pengguna jalan mengalami kerugian berupa luka-luka dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Sartika Asih serta mengalami beberapa kerusakan terhadap sepeda motor yang di kendarai. Sebagaimana dimaksud pohon yang berada di taman, jalur hijau, jalan, dan taman pemakaman umum dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tumbangnya pohon yang berada di pinggiran jalan hingga memakan korban tentu merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan, namun peristiwa tersebut dengan segala akibatnya adalah suatu fakta yang menimbulkan aspek hukum, terutama jika menimbulkan korban. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung bertanggung jawab atas tumbangnya pohon yang menimpa pengguna jalan tersebut, karena berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Daerah di bidang perumahan, permukiman, prasarana sarana dan utilitas, pertanahan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan

pembantuan.² Serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung jo Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan bertanggung jawab atas penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung.

Tumbangnya pohon yang menimpa pengguna jalan pun dapat dikualifikasi dengan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatig daad) seperti ditentukan dalam pasal 1365 yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dan juga setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati, serta kerugian yang disebabkan perbuatan-

² Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengkaji dari segi yuridis mengenai **“TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS TUMBANGNYA POHON YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG YANG MENIMPA PENGGUNA JALAN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JO UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab hukum atas tumbangnya pohon yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung yang menimpa pengguna jalan dihubungkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Atas Tumbangnya Pohon Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Yang Menimpa Pengguna Jalan Dihubungkan Dengan Pasal 1367 KUH Perdata?

3. Bagaimana penyelesaian hukum atas tumbangnya pohon yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung yang menimpa pengguna jalan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang tanggung jawab hukum atas tumbangnya pohon yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung yang menimpa pengguna jalan dihubungkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang akibat Hukum Atas Tumbangnya Pohon Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Yang Menimpa Pengguna Jalan Dihubungkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
3. Untuk mengetahui tentang penyelesaian hukum atas tumbangnya pohon yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung yang menimpa pengguna jalan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Secara teoritis penulis berharap melalui penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan kontribusi bagi perkembangan ilmu Hukum di Indonesia, khususnya dalam pembahasan mengenai tanggung jawab hukum atas tumbang pohon yang menimpa pengguna jalan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai hak-hak dan pertanggungjawaban akibat tumbang pohon yang menimbulkan kerugian terhadap hak-hak orang lain dan Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga dan mengelola

lingkungan hidup sehingga lebih memperhatikan pohon yang dikelolanya agar tidak merugikan orang lain.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu wewenang negara adalah mengatur seluruh wilayah dan masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Namun terlepas dari hal itu, sebuah negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, serta menyejahterakan warga negaranya. Pada saat ini tujuan negara secara umum adalah membentuk dan memelihara hak serta kemerdekaan warga negaranya. Untuk memperoleh hal tersebut maka perlu disusun sebuah konstitusi yang berisi aturan dan prinsip-prinsip dasar bagi sebuah negara. Di Negara Indonesia, konstitusi tersebut tertuang dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Undang-Undang ini bersifat mengatur, mengikat, dan wajib bagi seluruh warga negara. Undang-undang adalah bentuk hukum tertulis dari sebuah negara untuk melindungi hak serta kemerdekaan warga negaranya demi tercapainya salah satu tujuan negara Indonesia.

Tujuan negara Indonesia telah tercantum dalam konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV pada alinea ke IV yang berbunyi Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia.

Indonesia merupakan Negara hukum hal tersebut tercermin didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.³ Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum barat, hukum Islam dan hukum adat sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum barat (Eropa Kontinental) khususnya Belanda disebabkan oleh sejarah masa lalu karena Indonesia pada masa itu merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda.⁴ Maka dari itu sebagai Negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai ketertiban, kesejahteraan dan kemakmuran setiap masyarakatnya.

Hukum menjadi landasan yang paling dasar di dalam suatu kehidupan. Jika di dalam suatu negara tidak adanya suatu hukum maka negara tersebut

³ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1 ayat (3)

⁴ Hanafi Arief, Pengantar Hukum Indonesia, PT. LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016,

akan mengalami berbagai masalah yang akan timbul. Hukum merupakan mekanisme dalam kontrol sosial di dalam masyarakat, masyarakat menerapkan hukum secara sistematis untuk menegakkan hukum yang terdapat di Indonesia.⁵ Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan, ketertiban, dan keteraturan. Hukum mengatur secara komprehensif tindak tanduk aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum, maupun manusia dengan alam (ekosistem lingkungan). Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁶

Pada dasarnya tumbangnya pohon merupakan peristiwa alam, tumbangnya pohon dapat disebabkan oleh faktor alam maupun kelalaian manusia. Apabila tumbangnya pohon tersebut merugikan hak-hak orang lain, tentu hal tersebut menjadi kerugian bagi pihak yang terkena dampaknya. Tumbangnya pohon dapat terjadi akibat berbagai hal seperti sesuatu hal diluar

⁵ Samsul Wahidin, Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Menuju Law And Legal Reform, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm 160.

⁶ Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan, Mazahib, Vol XV, No. 1, 2016

kehendak manusia seperti faktor alam seperti contohnya angin kencang, badai, tsunami dan bencana lainnya, namun bisa juga akibat dari kelalaian manusia dalam mengelola pohon tersebut akibat tidak dilakukannya pengawasan, perawatan dan pengecekan rutin terhadap pohon tersebut sehingga tumbangya pohon tersebut dapat terjadi, dan hal buruknya kemungkinan pohon tersebut akan menimpa sesuatu yang berada didekatnya bahkan hingga menimbulkan kerugian bagi seseorang baik dari segi materiil maupun imateriil sehingga hal tersebut patut dimintai pertanggungjawabannya sebagai perbuatan melawan hukum.

Konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang setelah putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum Cohen*,. Sejak putusan itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis. Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH

Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1. Ada Suatu Perbuatan
2. Perbuatan Itu Melawan Hukum
3. Ada Kesalahan dari Pelaku
4. Ada Kerugian Korban.

⁷ R.Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 346.

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djodirdjo mencerminkan hanya pada sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.⁸ Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”⁹ Dari kedua pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja hanya mencakup perbuatan, tetapi mencakup pula tidak berbuat sesuatu. selanjutnya pasal 1367 ayat (1) menyebutkan: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.” Menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.¹⁰

Pada dasarnya kerugian yang timbul dari adanya perbuatan melawan hukum harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk

⁸ MA. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. .

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 346.

¹⁰ M.A Moegni Djodirdjo: *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm 73.

menggantinya.¹¹ Dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata, kerugian dan ganti rugi berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dengan 22 (dua) pendekatan, yakni ganti rugi umum (Pasal 1243 KUHPerdara), dan ganti rugi khusus (Pasal 1365 KUHPerdara). Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbul suatu ikatan (*verbintenissen*) untuk memberikan ganti rugi yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Terdapat 2 metode pemberian ganti kerugian yaitu metode konkrit dan metode subyektif. Pemberian ganti kerugian dengan metode konkrit yaitu dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan pengembalian dalam keadaan semula yang rusak adalah yang harus diganti, sedangkan metode subyektif yaitu menyesuaikan pada keadaan diri si pelaku (subyektif) dari si pelaku atau orang yang bersangkutan.¹² Selain itu juga dapat ditempuh dengan cara lain, yaitu dengan penafsiran harga atau *ex aequo et bono* (asas kepatantasan).

¹¹ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002., hlm. 134

¹² M.A. Moegni Djojodirdjo, SH. 1982. Perbuatan Melawan Hukum . Pradnya Paramitha, Jakarta: Hlm 78

Tingginya angka pembangunan, dan tingginya angka kendaraan bermotor dan berkembangnya sektor industri di Kota Bandung, tak luput dari hal negatif yang menghampiri, Pohon merupakan bagian yang penting dalam sebuah ekosistem. Pohon menyediakan sumber makanan dan tempat tinggal bagi makhluk hidup lain. Sedangkan di perkotaan, selain berperan sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga dapat menyerap air untuk mengurangi resiko terjadinya banjir dan tingginya tingkat polusi udara. Oleh sebab itu pohon banyak ditanam di pinggir jalan dan taman-taman. Pemerintah pun harus memperhatikan dan mengimbangi keadaan dengan melakukan penghijauan dengan cara membuka ruang terbuka hijau yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dikatakan bahwa ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Masih dalam penjelasan pasal yang sama disebutkan bahwa yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, bahwa Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk:

1. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
2. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
3. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Melihat ketentuan-ketentuan dan unsur-unsur diatas, merupakan kewenangan pemerintah daerah kota dalam hal tanggung jawab terhadap pohon yang berada di taman kota, taman pemakaman umum, sungai, pantai dan jalur hijau sepanjang jalan, karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung menjelaskan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan pertamanan.

Ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan

Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, menyebutkan “UPT Penghijauan Pertamanan dan Pemeliharaan Pohon pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f angka 4, mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan lingkup penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon.”¹³

Dijelaskan secara tegas bahwa fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan itu sendiri pada ayat (2) huruf yaitu “Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengendalian Pohon dan Penghijauan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon;
- b. pelaksanaan operasional penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon;
- c. pelaksanaan ketata usahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penghijauan pertamanan dan pemeliharaan pohon.¹⁴

¹³ Lihat Pasal 22 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

¹⁴ Lihat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Dalam pembentukan aturan hukum, terdapat asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵ Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya hingga akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kesewenang-wenangan akibat sistem hukum yang tidak tegas, sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas.

Hukum sudah seharusnya mengandung nilai dan asas keadilan, hakikat keadilan itu sendiri adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).¹⁶ Tujuan hukum itu

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

¹⁶ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

sendiri adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan serta mendapatkan perlindungan hukum atas segala hak yang dimiliki.

Dalam rangka penanaman pohon yang dilakukan tidak serta merta pemerintah lepas tangan dari tanggung jawabnya karena mengingat salah satu fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan yaitu melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penanaman pohon tersebut agar tidak terjadi sesuatu hal yang dapat merugikan seseorang dikemudian hari, seperti tumbangnya pohon. Maka setiap orang berhak dimintai pertanggung jawabannya jika terjadi peristiwa yang merugikan hak-hak orang lain baik karena perbuatannya yang disengaja atau terjadi karena kelalaian maupun karena suatu kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Karena berdasarkan teori tanggung jawab hukum (*Theory of legal liability*) yang telah dikembangkan oleh Hans Kelsen tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁷

1. Tanggung jawab yang didasrakan kesalahan; dan

¹⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2013, hlm. 211

2. Tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan dan dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya di mana subjek hukum lengah, atau kurang berhati-hati, atau lupa melaksanakan kewajibannya. Perbuatan melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang melainkan perbuatan melawan hukum itu harus diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang merugikan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan patut dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam mengelola dan mengawasi pohon yang berada dibawah pengawasannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum

primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁸

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode deskriptif analitis, dalam penelitian ini penulis akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang Tanggung Jawab Hukum Atas Tumbangnya Pohon Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan Kota Bandung Yang Menimpa Pengguna Jalan Dihubungkan Dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Metode Pendekatan

Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.¹⁹ Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Semua data yang di peroleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas mengenai

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group 2005, hlm. 181

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.93

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group 2005, hlm.

tanggung jawab hukum atas tumbangnya pohon yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung yang menimpa pengguna jalan. 2

3. Tahap Penelitian

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder penulis mengumpulkannya melalui tahap, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

Penelitian kepustakaan dalam penulisan hukum ini meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier jika diperlukan, adapun penejelasannya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- e) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- f) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
- g) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa

doktrin (pendapat para ahli) berupa buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah, dan dokumen- dokumen terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa hukum, Belanda-Indonesia

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian yang menghasilkan data dengan melakukan wawancara secara langsung di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung. Tahap ini didasarkan atas tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Studi Kepustakaan

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah dengan menggunakan kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah data yang di kumpulkan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Pertamanan² (DPKP3) Kota Bandung guna mengetahui proses pertanggungjawaban tumbangnya pohon yang menimpa pengguna jalan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data² merupakan suatu proses² pengadaaan data untuk keperluan² penelitian skripsi. Alat¹ pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menggunakan kepustakaan guna mendapatkan informasi, data-data, dan melakukan¹ penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan, surat kabar, dokumen, jurnal, dan peraturan¹ perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan¹ teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan

narasumber mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif data dianalisis secara Yuridis Kualitatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. dengan menganalisis suatu data yang telah diperoleh tanpa mempergunakan perhitungan angka. Analisis data kualitatif menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Setelah memperoleh data-data tentang kronologis, kerugian, dan pengelola pohon, kemudian menganalisis data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian membuat kesimpulan yang khusus.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

a. Lokasi Studi Perpustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung Jl. Dipatiukur Nomor 35, Bandung

3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jl Seram Nomor 2

b. Instansi

1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan
Pertamanan Kota Bandung di Jl. Caringin No.103, Babakan Ciparay,
Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40223.